

PERTIMBANGAN PENENTUAN PENGENDALI KEUANGAN KELUARGA: SEBUAH ANALISA NILAI PERAN GENDER DALAM INTERAKSI PASANGAN SUAMI ISTRI

Fathul Lubabin Nuqul
Fakultas Psikologi UIN Maliki Malang

Abstract

Relasi antara suami istri dalam ikatan rumah tangga merupakan relasi yang unik, faktor budaya dalam berkeadilan menjadi hal penting untuk mengelola keluarga, misalnya keuangan. Penelitian ini melibatkan 137 orang. Latar belakang subyek penelitian adalah mahasiswa, dengan perincian 111 orang perempuan dan 26 orang laki-laki. Pengambilan data dilakukan dengan menggunakan angket terbuka. Hasilnya menunjukkan bahwa ada proporsi yang seimbang pada penilaian keadilan pada pihak (suami-istri) sebagai pihak pengendali keuangan. Untuk alasan yang mendasari pada mereka yang memilih suami sebagai pengendali keuangan lebih karena merasa bahwa suami adalah kepala keluarga (*gender role orientation*), sedangkan pada pihak yang merasa istrinya yang harus mengendalikan finansial keluarga lebih berorientasi pada kompetensi istri dibandingkan peran.

Key word: Fairness, Family, Finance. Gender

Latar Belakang

Ikatan perkawinan merupakan ikatan yang sakral yang diatur oleh undang-undang negara dan termaktub dalam norma budaya serta ajaran agama. Perkawinan bukan semata-mata untuk kebutuhan biologis tetapi juga untuk pemenuhan aspek psikologis, yang meliputi kebutuhan cinta kasih, rasa aman, perlindungan dan sebagainya (Hawari, 1997). Selain itu perkawinan juga mempunyai tujuan sosial yakni terbentuknya keluarga yang bahagia. Keluarga merupakan kelompok terkecil dalam sebuah tatanan masyarakat, tetapi peran keluarga dalam masyarakat bahkan negara sangat penting. Keluarga berfungsi sebagai garda depan pendidik generasi bangsa. Ada lima fungsi yang dapat dijalankan keluarga, yaitu: 1). Fungsi biologis: Untuk meneruskan keturunan, memelihara dan membesarkan anak, dan memelihara serta merawat anggota keluarga; 2). Fungsi psikologis: memberikan kasih sayang dan rasa aman, perhatian, dan pendewasaan kepribadian pada anggota keluarga; 3). Fungsi sosialisasi: Membina bersosialisasi pada anak, dan pembentukan norma serta nilai budaya pada anak-anak; 4). Fungsi ekonomi: Mencari sumber-sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, dan mengatur penggunaan penghasilan keluarga untuk memenuhi kebutuhan keluarga. 5) Fungsi pendidikan: memberikan pengetahuan, ketrampilan dan membentuk perilaku anak sesuai dengan bakat dan minat yang dimilikinya, mempersiapkan anak untuk kehidupan dewasa

yang akan datang dalam memenuhi peranannya sebagai orang dewasa, mendidik anak sesuai dengan tingkat -tingkat perkembangannya.

Begitu penting fungsi dan peran keluarga, diperlukan sebuah manajemen untuk membina kelangsungan dan keharmonisan keluarga. Untuk mengemban fungsi manajemen tersebut, umumnya sebuah keluarga mempunyai pola-pola manajemen tersendiri. Pola manajemen keluarga terkait dengan nilai dan budaya. Misalnya dalam budaya patriarkhi, seorang suami merupakan pemimpin sebuah ikatan perkawinan. Suami merupakan figur sentral dalam keluarga dan sebaliknya istri sebagai figur yang marginal, sehingga istri dalam keluarga hanya sebagai pelayan keluarga.

Posisi suami dan istri dipengaruhi oleh peran jenis. Peran laki-laki dan perempuan merupakan peran yang berbentuk dari faktor sosial. Dengan kata lain peran perempuan dan laki-laki dikendalikan oleh masyarakat dan peran jenis mengkristal menjadi norma masyarakat. Konsekuensi dari sebuah norma, maka peran akan menjadi panduan perilaku anggota masyarakat. Masyarakat akan menghukum anggotanya jika mereka berperilaku tidak sesuai dengan norma yang berjalan di masyarakat, termasuk dalam norma perkawinan dan keluarga.

Kajian Teori: Nilai Gender dan Perkawinan

Banyak studi tentang perkawinan telah mengabaikan peran gender dalam penelitian kualitas perkawinan dari waktu ke waktu, Teori feminis merupakan sumber teori berbasis kepuasan perkawinan digunakan sebagai kerangka teoretis untuk menguji efek dari peran gender pada perubahan kepuasan dan konflik perkawinan bagi suami dan istri (Brown, 1994). Teori feminis digunakan sebagai kerangka kerja untuk memahami arti dan pentingnya gender,

Dua pendekatan teoretis yang telah mendominasi studi gender (Levant & Philpot, 2001), yaitu esensialisme (paradigma identifikasi peran gender) dan konstruksionisme (paradigma *gender role strain*). Dalam studi awal paradigma identifikasi peran gender, berasal dari pandangan esensialis atau nativist peran seks, yang menekankan ide bahwa ada gender maskulin atau feminin yang jelas berbeda dan ditentukan secara biologis. Baru-baru ini, ilmuwan gender (Levant & Philpot, 2001) berpendapat bahwa teori ini mengabaikan pentingnya faktor sosial dan lingkungan dalam membentuk gender. Peran paradigma identitas gender telah ditentang karena menunjukkan bahwa individu mendapat peran gender tradisional mereka (pengertian tradisional menjadi maskulin atau feminin).

Sebaliknya, studi yang didasarkan pada paradigma *gender role strain*, yang muncul dari konstruksionisme. Pendekatan ini melihat peran gender sebagai sebagian besar

dibangun secara psikologis atau sosial, dan tidak semata-mata ditentukan secara biologis. Perbedaan teoritis penting adalah bahwa meskipun ada perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan, banyak yang secara sosial dibangun oleh budaya patriarki dan memperkuat peran gender tradisional untuk menjaga perempuan dalam satu posisi. Peran gender sebagai suatu pembiasaan (*conditioning*) masyarakat terhadap anak perempuan dan anak laki-laki. Anak laki-laki diajarkan untuk mandiri, berinisiatif mengambil tindakan, berorientasi pada tugas, rasional dan analitis sedangkan anak perempuan dididik untuk mampu berempati, bersifat non kompetitif, dan intuitif, tergantung dan penolong. Standar tersebut terus menerus dijadikan patokan dari perilaku yang normal serta tetap menjadi tuntutan masyarakat terhadap orang yang sudah dewasa sekalipun (Mac Kinnon, 1979; Bem 1981). Peran jenis mempunyai implikasi pada banyak hal antara lain, kehidupan dalam pernikahan, keluarga, kepemimpinan, dan penilaian keadilan.

Teori feminis dari Brown (1994) mengedepankan kesadaran perbedaan kekuasaan yang terkait dengan gender. Pembagian kerja rumah tangga merupakan salah satu sumber ketidakadilan gender (Brown, 1994). Hochschild (1989) mengatakan bahwa perempuan yang bekerja di luar pekerjaan rumah sebagai "shift kedua" karena sering setelah mengerjakan pekerjaan "*full-time*", kemudian perempuan secara lebih in-proporsional menghadapi tuntutan tambahan merawat rumah dan anak-anak. Pembagian kerja rumah tangga jatuh dalam peran gender tradisional, istri melakukan proporsi jauh lebih besar dari tugas-tugas rumah tangga dari suami, bahkan di rumah tangga di mana sang istri memperoleh lebih dari suaminya (Greenstein, 1995). Dalam studinya tentang kepuasan perkawinan antara perempuan bekerja, Greenstein (1995) menemukan bahwa peran gender dipengaruhi hasil identifikasi terhadap kepuasan perkawinan. Jam bekerja per minggu tidak memiliki efek yang secara statistik signifikan bagi perempuan memegang peran tradisional gender ideologi, tapi memiliki efek negatif terjadi pada stabilitas perkawinan bagi perempuan mengidentifikasi dengan ideologi gender non-tradisional atau berkelamin dua peran. Demikian pula dalam penelitian mengeksplorasi perubahan sikap peran gender.

Amato dan Booth (1995) menemukan bahwa ketika istri menganut sikap peran gender tradisional, mereka kurang merasakan penurunan kualitas perkawinan mereka, namun ketika suami mengadopsi sikap non tradisional, mereka dianggap meningkatkan kualitas perkawinan. Dalam pembahasan mereka, para penulis ini berhipotesis bahwa sebagai istri menjadi kurang tradisional lebih egaliter "mereka mungkin merasa bahwa mereka yang kurang beruntung atau dieksploitasi dan menjadi kurang puas dengan pernikahan mereka

dalam bentuk perilaku, mereka mungkin menuntut kekuatan pengambilan keputusan lebih atau tekan suami mereka untuk menghabiskan lebih banyak waktu melakukan pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan anak, karena keuntungan status quo laki-laki, banyak suami menolak perubahan ini. Jadi ketika sikap istri 'menjadi lebih progresif, ada kemungkinan menjadi lebih terbuka konflik antara pasangan dan stabilitas kurang dalam hubungan itu "(Amato & Booth, 1995; 58). Amato dan Booth (1995) menganggap bahwa implikasi dari sikap peran gender merupakan oposit untuk suami, hipotesa bahwa ketika suami mengadopsi nilai progresif dan sikap egaliter akan mengurangi konflik terbuka antara pasangan dan memunculkan stabilitas hubungan perkawinan.

Selain tugas rumah tangga, secara tradisional perempuan juga telah menerima tanggung jawab lebih untuk penitipan anak dan tugas mengasuh anak (Steil, 1997). Sementara suami telah menunjukkan tidak memiliki efek negatif terhadap suami kesejahteraan, pengasuhan sering berhubungan dengan berkurangnya kesejahteraan untuk istri (Steil, 1997). Dari perspektif feminis, perbedaan ini dapat dikaitkan dengan ketidakadilan gender untuk laki-laki dan peran perempuan dalam masyarakat yang kondisi perempuan lebih mungkin memiliki tanggung jawab untuk mengasuh anak-anak.

Simon (1995) meneliti persepsi laki-laki dan perempuan kerja dan peran keluarga. Pria dan perempuan diminta untuk menjelaskan makna menjadi ibu atau ayah yang "baik". Simon (1995) menemukan bahwa untuk pria, dianggap menjadi ayah yang baik jika mampu memberikan nafkah sementara beberapa perempuan sebagai ibu yang baik jika terlihat bertanggung jawab dalam pekerjaan dan melaksanakan kewajiban utamanya untuk keluarga. Dari perspektif feminis, peran gender pengaruh perbedaan dalam cara laki-laki dan perempuan mengelola konflik. Perempuan lebih mungkin untuk memulai diskusi tentang isu-isu yang berhubungan konflik (Gottman, 1999).

Masih banyak kebingungan tentang pola interaksi dengan perkawinan, hal ini disebabkan, penelitian psikologi sosial tidak akan pernah lepas dari konteks sosial individu. Untuk itu perlu pendekatan yang lebih mampu mengeksplorasi nilai-nilai dan pandangan anggota keluarga, khususnya suami dan istri, dalam menjelaskan kehidupan perkawinan, yaitu dengan mengeksplorasi pikiran dan sikap responden tentang hubungan keluarga terutama pada faktor peran ekonominya.

Hal ini yang mendorong peneliti untuk mengeksplorasi nilai-nilai dalam interaksi suami istri dalam ikatan perkawinan. Dengan menggunakan metode pemberian skenario yang diharapkan mampu membawa responden pada suasana sebenarnya sedangkan untuk mengeksplorasi alasan-alasan subyek penelitian dilakukan dengan angket terbuka .

Metode Penelitian

Penelitian ini melibatkan 137 orang. Latar belakang subyek penelitian adalah mahasiswa, dengan perincian 111 orang perempuan dan 26 orang laki-laki. Pada masing-masing responden diminta untuk mentelaah skenario sebagai berikut;

Sebuah rumah tangga, dengan komposisi suami bekerja *fulltime* pada perusahaan XX. Istri adalah ibu rumah tangga. Perusahaan XX menggunakan sistem rekening untuk mendistribusikan gaji karyawannya. Hal inilah yang menyebabkan suami-istri mengalami sedikit percekocokan. Si Istri menginginkan mengendalikan keuangan dengan memegang kartu ATM Gaji Suaminya. Sebaliknya suami bersikeras tetap memegang kendali keuangan dan dialah yang menyimpan kartu ATM Gajinya. Menurut anda siapa yang berhak untuk memegang kendali keuangan dalam hal ini kartu ATM (sebagai lambang supremasi pengelolaan keuangan) tersebut?

Subyek penelitian diminta untuk menentukan siapa yang lebih berhak memegang kartu ATM sebagai lambang supremasi pengendalian uang alternatif jawabannya adalah a. Suami; b. Istri; c. Abstain. Untuk lebih memperjelas hasil penelitian maka tiap responden diminta untuk memberi alasan pilihannya dengan menggunakan angket terbuka. Penggunaan angket terbuka dianggap paling tepat dalam penelitian-penelitian sosial yang bertujuan untuk mengeksplorasi isi pikiran dan pendapat responden.

Analisa data pada penelitian ini menggunakan kombinasi kualitatif dan kuantitatif. Dari pilihan subyek penelitian diskor dan dianalisis dengan menggunakan analisis distributif, sedangkan untuk analisa tentang alasan subyek penelitian dilakukan dengan kategorisasi terlebih dulu dan kemudian dilakukan penghitungan untuk analisis lebih lanjut.

Hasil Penelitian

Hasil menunjukkan dari 137 subyek penelitian, 73 orang atau 53,3 % menyatakan suami sebagai pihak yang layak mengendalikan keuangan keluarga. 56 orang atau 40,9% menyatakan Istri sebagai pihak yang berhak mengendalikan uang keluarga, sedangkan 8 orang atau 5,8% subyek abstain. Seperti dalam tabel berikut:

Tabel 1. Distribusi pilihan subyek tentang pemegang otoritas keuangan keluarga

No		Frekwensi	Persentase
1	Suami	73	53,3
2	Istri	56	40,9
3	Abstain	8	5,8
	Total	137	100,0

Dalam Crosstabulation antara Jenis Kelamin dan Pilihan pemegang kendali keuangan keluarga pada tabel 2, menunjukkan bahwa dari 111 perempuan, 57 orang atau 51,4% memilih suami sebagai pengendali keuangan keluarga, sedangkan subyek perempuan yang memilih istri sebagai pengendali keluarga sebanyak 50 orang atau 45,0% dan 4 orang atau 3,6 % abstain. Pada subyek laki-laki sebanyak 16 orang dari 26 keseluruhan subyek atau 61,5% memilih suami sebagai pengendali keuangan keluarga, dan hanya 6 orang atau 23,1% orang yang memilih istri sebagai pengendali keuangan keluarga 4 (15,4%) orang lainnya abstain. Hasil distribusi ini cukup menarik untuk dicermati, karena pada perempuan, meskipun tidak terpaut besar, lebih banyak yang memilih suami sebagai pengendali keuangan.

Tabel 2. Crosstabulation Jenis Kelamin vs Pilihan Pengendali Keuangan

		Pengendali keuangan			Total
		Suami	Istri	Abstain	
Jenis Kelamin	Perempuan	57	50	4	111
	Laki-laki	16	6	4	26
Total		73	56	8	137

Penelitian ini juga menelusuri alasan subyek dalam penentuan pilihan pengendali keuangan. Dengan melakukan kategorisasi dari jawaban dalam angket terbuka. Alasan subyek yang memilih suami antara lain Dominasi Peran Suami (mis: suami sebagai kepala keluarga), Suami yang Bekerja; kompetensi suami (mis: suami lebih bisa mengatur keuangan); Kelemahan Istri (mis: Perempuan boros). Untuk responden yang memilih istri sebagai pengatur keuangan keluarga adalah Kompetensi Istri (mis: istri lebih bisa berhemat); Peran Istri (mis: istri yang mengatur rumah tangga); Kelemahan Suami (mis: jika dipegang suami, maka suami *nyeleweng*); membantu suami. Selain itu ada alasan “musyawarah” dulu sebelum menentukan, hal ini merupakan pilihan tengah dari subyek penelitian. Secara umum dari distribusi dan alasan responden dapat disimpulkan bahwa nilai tradisional masih mempengaruhi sikap subyek dalam menganalisa problem keluarga. Guna lebih memberikan tekanan alasan yang paling dominan yang dipilih oleh subyek penelitian dalam menentukan pilihan pemegang keuangan terlihat seperti tabel 3.

Tabel 3. Alasan Penentuan Pilihan

Alasan	Jumlah	Persentase
Dominasi Peran Suami	47	34,31
Suami Bekerja	21	15,33
Kelemahan Istri	1	0,73
Kompetensi Suami	3	2,19
Kompetensi Istri	33	24,09
Peran Istri	17	12,41
Kelemahan Suami	2	1,46
Membantu suami	1	0,73
Musyawaharah	12	8,76
Total	137	100,00

Dari pemilihan suami sebagai pengendali keuangan lebih didasari karena peran dominan yang dimiliki oleh suami dalam keluarga. Pada pemilih Istri sebagai pengendali keuangan karena istri dianggap sebagai pihak lebih berkompeten sebagai pengendali keuangan dibanding dengan seorang suami (lihat gambar 2). Sedikit (3 orang) yang memilih kompetensi suami sebagai alasan pemilihan suami untuk mengendalikan keuangan.

Sementara itu diantara kedua kubu ada 12 orang yang cenderung mengedepankan musyawarah sebagai solusi dalam menentukan keuangan keluarga. Alasan ini muncul diduga karena adanya keinginan pada subyek untuk mencari jalan tengah dalam perselisihan keluarga, mereka menganggap bahwa hubungan antara suami istri merupakan hubungan yang saling menguntungkan.

Dominasi suami dalam kekuasaan keluarga baik pada subyek laki-laki maupun perempuan mengindikasikan ada beberapa hal yang mempengaruhi, yaitu: Pertama, Doktrinasi peran Gender Patriarkhi yang mendominasi sistem pengasuhan anak di Indonesia. Pada beberapa adat di Indonesia masih kental dalam penerapan budaya patriarki, yang menitik beratkan tentang kekuasaan laki-laki. Dalam Budaya Jawa misalnya seorang anak laki-laki tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang terkait dengan urusan domestik, seperti masak, menyapu dan lain sebagainya. Jika laki-laki mengerjakan hal ini maka dianggap *saru* (tabu). Bahkan ketika dia telah menikah maka dia tetap tinggal dirumah ayahnya. Berbeda dengan perempuan, sejak kecil telah dididik untuk melaksanakan pekerjaan domestik, seperti masak, mencuci baju dan dididik untuk menjadi istri yang baik,

bahkan ketika telah menikah dia harus mengikuti suami. Budaya ini tentu memberikan kekuasaan yang lebih pada suami untuk menentukan urusan keluarga.

Jika pola pengasuhan ini berlangsung terus menerus maka terjadi yang tidak merata antara suami dan istri. Suami dianggap sebagai kepala rumah tangga dan istri adalah pendampingnya. Sehingga jika suami-istri sama-sama berkerja maka suami harus pendapatan yang lebih besar dibanding dengan istri. Hal ini sering memunculkan masalah jika seorang istri bergaji lebih besar daripada suami dalam sebuah keluarga yang menganut nilai tradisional.

Seperti yang dikatakan oleh Amato dan Booth (1995) bahwa ketika seseorang menganut sikap peran gender tradisional, mereka kurang merasakan penurunan kualitas perkawinan mereka, atau dengan kata lain ketidakadilan yang terjadi pada keluarga dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Pada peran gender tradisional, laki-laki harus memerankan peran yang dominan dan agresif, sedangkan perempuan harus bersikap lembut dan menerima serta lebih berfokus pada keluarga. Hal ini tampak menjadi landasan subyek umumnya ketika mempertimbangkan pilihannya (Bem, 1981). Dengan menganggap bahwa suami atau laki-laki harus mengendalikan keluarganya karena laki-laki memang berperan sebagai kepala keluarga. Di sisi lain subyek yang menganggap perempuan atau istri sebagai pengendali keuangan karena “hanya” istri lebih bisa berhemat atau dengan kata lain karena faktor fungsional.

Simon (1995) meneliti persepsi laki-laki dan perempuan kerja dan peran keluarga. Pria dan perempuan diminta untuk menjelaskan makna menjadi ibu atau ayah yang “baik”, dan menemukan bahwa untuk pria, dianggap menjadi ayah yang baik jika mampu memberikan nafkah sementara beberapa perempuan sebagai ibu yang baik jika terlihat bertanggung jawab dalam pekerjaan dan melaksanakan kewajiban utamanya untuk keluarga. Maka dari penelitian ini sebenarnya bisa dikembangkan siapa istri atau suami yang baik terkait dengan pengendalian keuangan.

Dari sisi konsep keadilan dalam rumah tangga, pada nilai peran gender progresif maka ketidak seimbangan dalam berinteraksi akan mengakibatkan permasalahan keluarga, misalnya perceraian. *social exchange theory* menjelaskan tentang pola pikir individu tentang hasil dalam hubungan sosial, termasuk hubungan perkawinan. Teori ini memfokuskan pada sesuatu yang ditanamkan individu dalam hubungan sosial apakah dukungan emosional atau dukungan finansial. Teori ini berasumsi bahwa individu mempunyai kebebasan memilih dan sering menjumpai situasi sosial yang membuat individu tersebut harus memilih di antara beberapa alternatif tindakan. Ada tindakan yang

menyediakan keuntungan (*reward*) dan membutuhkan modal (*cost*), banyak jenis reward secara sosial antara lain uang, kebaikan, pelayanan, status, pujian dari pihak lain dan lain sebagainya. Teori ini memposisikan individu sebagai orang yang hedonis (yang selalu ingin memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan modal) akibatnya individu memilih tindakan yang menghasilkan keuntungan yang baik ($\text{keuntungan} = \text{Hasil} - \text{Modal}$) dan menjauhi tindakan yang menghasilkan keuntungan yang sedikit (Ritzer & Goodman, 2004).

Terkait dengan hubungan suami istri dalam pernikahan juga bisa dijelaskan dengan teori ini. Sebuah hubungan pernikahan yang tidak seimbang baik secara finansial maupun non finansial akan mengakibatkan tekanan (*tention*) pada salah satu pihak. Jika tekanan ini berlangsung terus menerus maka akan mengakibatkan depprivasi relatif kemudian menimbulkan reaksi. Meskipun demikian, sebuah hubungan perkawinan tidak selalu bisa persisi terkait dengan keadilan tetapi nilai dan norma yang dianut oleh individu dan masyarakat akan mempengaruhi kekuatan menghadapi ketidak adilan (Amato & Booth, 1995) dan konflik (Gottman, 1999)

Kesimpulan

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa nilai peran gender masih sangat mempengaruhi penilaian individu terhadap keadilan dan keseimbangan dalam keluarga. Hal ini berimplikasi bahwa pemahaman tentang “siapa yang layak mengerjakan apa” dalam keluarga khususnya sangat tergantung pada nilai individu yang bersangkutan. Seperti yang telah diketahui bahwa nilai individu merupakan hasil dari proses *social construction*. Dari hasil penelitian kali ini pada nilai tradisional cenderung menepatkan suami sebagai pengendali keuangan keluarga karena peran dominan suami. Jika peran pengedali keuangan diberikan pada istri karena kompetensi istri yang mampu mengendalikan keuangan dengan baik. Untuk itu berdasarkan hasil penelitian kali ini disarankan bahwa kebijakan, misal; program keluarga berencana, pendidikan berbasis keluarga, ekonomi yang terkait dengan keluarga, harus memperhatikan nilai-nilai yang ada dalam keluarga yang bersangkutan.

Daftar Pustaka

- Amato, P. R., & Booth, A. (1995). Changes in gender role attitudes and perceived marital quality. *American Sociological Review*, 60, 58–66.
- Baucom, D. H., Notarius, C. I., Burnett, C. K., & Haefner, P. (1990). Gender differences in sex-role identity in marriage. In F. D. Fincham & T. N. Bradbury (Ed.). *The psychology of marriage: Basic issues and applications* (pp. 150–171). New York: Guilford Press.

- Bem, S.L. (1981). Gender Schema Theory: A Cognitive Account of sex Typing. *Psychological Review*, 88, 354-364
- Brown, L. S. (1994). *Subversive dialogues: Theory in feminist therapy*. New York: Basic Books.
- Gottman, J. M. (1999). *The marriage clinic: A scientifically based marital therapy*. New York: W.W. Norton & Company.
- Greenstein, T. N. (1995). Gender ideology, marital disruption, and the employment of married women. *Journal of Marriage and the Family*, 57, 31–42.
- Hawari, D. (1997). *AlQur'an; Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*. Yogyakarta: PT Dana Bakti Prima Yasa
- Hochschild, A. (1989). *The second shift*. New York: Avon Books.
- Levant, R., & Philpot, C. (2001). Conceptualizing gender in marital and family therapy research: The gender role strain paradigm. In H. Liddle, D. Santisteban, R. Levant, & J. Bray (Eds.). *Family psychology: Science-based interventions* (pp. 301–329). Washington, D.C.: American Psychological Association.
- Mac Kinnon, C.A (1979). *Sexual Harrasment Of Working Women*. London: Yale University Press
- Ritzer G, dan Goodman D. J.,(2004). *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta:Kencana
- Simon, R.W. (1995). Gender, multiple roles, role meaning, and mental health. *Journal of Health and Social Behavior*, 36, 182–194.
- Steil, J. M. (1997). *Marital equality: Its relationship to the well-being of husbands and wives*. Thousand Oaks, CA: Sage.